

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KOTA PONTIANAK

Oleh:

ARNOLD CARLUBI PALESA^{1*}

NIM: E1011141082

Dr. Dedi Kusnadi, M.Si², Dr. H. Arifn, M.AB²

*Email: Carlubipalesa@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak mengenai implementasi distribusi beras sejahtera. Permasalahan yang terjadi cukup menarik untuk diteliti, dimana Rastra yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga miskin, tidak tepat jumlah karena tidak sesuai pedoman yang ditetapkan yaitu 10kg/RTS/bulan dan tidak tepat kualitas, beras yang dibagikan pemerintah tidak layak konsumsi dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang semestinya beras yang diterima adalah beras jenis medium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi beras sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota, dengan menggunakan metode penelian kualitatif fenomenologi, yaitu hanya menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa. Penelitian dilakukan, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa Implementasi Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak dinilai dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi dinilai belum optimal. Hal yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah pemerintah setempat harus lebih memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam implementasi distribusi beras sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak dan lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai program bantuan beras tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Distribusi, Beras Sejahtera

**THE IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIZED RICE
BERAS SEJAHTERA DISTRIBUTION IN THE URBAN VILLAGE OFFICE OF
SIANTAN HULU PONTIANAK**

By:

ARNOLD CARLUBI PALESA^{1*}

NIM: E1011141082

Dr. Dedi Kusnadi, M.Si², Dr. H. Arifn, M.AB²

*Email: Carlubipalesa@gmail.com

1. College Student of Public Administration Study Program at The Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University, Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program at The Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This research was conducted in the Urban Village Office of Siantan Hulu Pontianak. The researcher focused on implementing the distribution of “Beras Sejahtera” (Rastra), subsidized rice for the poor. The difficulties that occur were appealing to be investigated because the Rastra given to the community was considered not on target and did not reach all levels of society that fall within the criteria of poor families. In addition, the Rastra did not fit the established guidelines of which 10 kg per month for each household. Furthermore, the quality of rice distributed by the government to the poor was not proper for consumption and was not in accordance with established medium type rice standards. This study aimed to determine the implementation of the distribution of “Beras Sejahtera” in the Urban Village Office of Siantan Hulu by using qualitative phenomenological research methods. This method explored and interpreted the meaning of events. The study was conducted through interview techniques, observation, and documentation. From the research findings, it can be perceived that the aspects of organization, interpretation, and application are not yet optimal in the implementation of the Prosperous Rice Distribution in the Siantan Hulu Urban Village Office, Pontianak. The researcher recommends that the local government pay more attention to the problems that occur in the Implementation of the Distribution of “Beras Sejahtera” in the community and be more active in providing information about the rice assistance program.

Keywords : Implementation, Distribution, Subsidized Rice of “Beras Sejahtera”

A. PENDAHULUAN

Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin). Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun.

Program Rastra adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Rastra, berkaian dengan hal tersebut terbitlah peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Pedum Rastra, menyatakan bahwa implementasi distribusi Rastra

harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra yaitu tercapainya target 6T (Enam Tepat). Dalam pelaksanaannya Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan tersebut, yakni Rastra yang pertama, harus tepat sasaran, maksudnya adalah penerima Rastra harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan program tersebut. Kedua tepat jumlah, maksudnya jumlah beras yang diterima RTS harus 5 benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15 kg/bulan. Ketiga tepat harga, harga tebus Rastra yang telah ditetapkan harus dengan harga yang ditebus oleh RTS. Keempat tepat waktu, yaitu pendistribusian beras haruslah tepat waktu. Kelima tepat kualitas, yaitu kualitas beras yang didistribusikan haruslah yang layak dikonsumsi tidak berbau, berketu, dan pecah- pecah. Keenam tepat administrasi, yaitu prosedur persyaratan administrasi haruslah secara benar lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak, masalah yang dihadapi pada program Rastra ini adalah yang pertama Rastra yang tidak tepat sasaran karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat

yang masuk dalam kriteria keluarga miskin. Yang kedua tidak tepat jumlah karena tidak sesuai pedoman yang ditetapkan yaitu 10kg/RTS/bulan, sehingga masih ada masyarakat yang menerima beras dengan jumlah dibawah 10kg, dan yang ketiga tidak tepat kualitas, beras yang dibagikan pemerintah tidak layak konsumsi dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semestinya beras yang diterima adalah beras jenis medium, tetapi kenyataannya beras yang diterima masyarakat adalah beras yang berkualitas buruk seperti beras berwarna hitam, berdebu, berkutu, berbatu dan bau.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengkaji masalah tersebut dengan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan untuk meneliti bagaimana implementasi distribusi beras sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota, hal itu dilakukan guna memperoleh fakta dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Definisi Kebijakan publik menurut Edward III dan Sharkansy dalam Islamy

(2007:16). Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program .kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan menurut Lasswel dan Kaplan dalam Islamy (2007:17), Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bardack Dalam Agustino (2006:153), bahwa implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam katakata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang.

Terdapat tiga aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, penerapan. Apabila aspek tersebut

bersinergi dengan baik maka akan memberi peluang yang besar bagi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones dalam Nashir Budiman (1996:312) aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit- unit serta metode untuk menjalankan program berjalan.

b. Interpretasi

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Aplikasi atau Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi yang didalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi

merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yang merupakan suatu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah penerapan, penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

C. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini lebih menggambarkan pada deskripsi data dari pelaksanaan program yang dijadikan penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi. Iskandar (2010: 204), penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan

orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu.

2. Langkah - langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian ini yaitu dalam Pasolong (2013, 162-163) :

1. Melakukan Penelitian Pendahuluan
Dalam melakukan langkah pertama, yang dilakukan peneliti adalah turun langsung ke lapangan melakukan pengamatan awal guna mengetahui dan mengumpulkan secara jelas permasalahan yang terjadi untuk membuat rencana penelitian (usulan penelitian).
2. Membuat Usulan Penelitian
Setelah melakukan pengamatan awal, maka selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan penelitian didalam sebuah usulan penelitian.
3. Pengambilan Data Sekunder
Peneliti mengumpulkan data yang berupa laporan-laporan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian.
4. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Analisa Data

Kemudian informasi dan data yang telah terkumpul, peneliti akan menganalisis informasi dan data tersebut sehingga dapat kesimpulan dari permasalahan yang ada.

6. Penyusunan Laporan Penelitian/Skripsi

Adapun laporan penelitian/skripsi disusun peneliti berdasarkan hasil kesimpulan akhir dari analisis data yang diperoleh dilapangan.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena masih adanya masalah mengenai program Rastra yang tidak tepat sasaran, jumlah dan kualitas. Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2018

4. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek sebagai landasan yaitu: “Implementasi Distribusi Beras Sejahtera di kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak”. Subjek penelitian terdiri dari Lurah Siantan Hulu Kota Pontianak, Kabid pelayanan publik perum Bulog Devisi regional Kalimantan Barat,

Pegawai Perum Bulog) Masyarakat penerima bantuan Beras Sejahtera (2 orang).

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data yang diperlukan berupa teknik dan alat sebagai berikut :

- a. Teknik observasi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan pengamatan awal guna mengetahui fenomena yang terjadi mengenai Rastra di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak.
- b. Teknik wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara, serta wawancara biasa. Teknik ini digunakan untuk menjaring data dan informasi dari informan tentang hal – hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Pada teknik ini peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, khususnya yang menjadi informan dan wawancara dilakukan

secara purposive sampling. Adapun informan yang peneliti wawancara yaitu Lurah Siantan Hulu Kota Pontianak, Kabid pelayanan publik perum Bulog Devisi regional Kalimantan Barat, Pegawai Perum Bulog dan Masyarakat penerima bantuan beras sejahtera (2 orang).

- c. Teknik dokumentasi, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan berbagai macam alat, misalnya kamera, komputer dan perekam suara. Alat-alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengamatan dapat direkam dengan lebih sempurna dan peneliti dapat berulang kali mengamati dengan seksama. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa arsip dari Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak.

6. Instrumen Penelitian Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan instrumen lainnya sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara, yaitu pertanyaan yang disusun dan didasarkan pada data-data dan keterangan yang ingin diperoleh penulis dengan mendasarkan pada

kecukupan data sesuai dengan fokus permasalahan yang diamati.

- b. Pedoman observasi, yaitu penulis melihat-lihat gejala di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti mengadakan pencatatan kecil untuk selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung data dan keterangan dari masalah yang diamati.
- c. Alat dokumentasi yaitu, alat dokumen yang berupa kumpulan data berbentuk catatan, laporan atau dokumentasi. Kemudian dokumen tersebut dicopy sebagai bukti untuk dijadikan data.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen dalam Sugiyono (2009, 92) yaitu:

- a. Meringkas (reduksi data) dari hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancara dalam bentuk rangkuman yang memilih hal-hal pokok kemudian dilakukan editing terbatas, tujuannya agar data yang akan dianalisis benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Memaparkan (display) dari hasil observasi dan wawancara. Hasil

observasi dan wawancara yang dilakukan disajikan dalam bentuk catatan atau uraian singkat, yang mudah dibaca sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data dan memahami apa yang terjadi.

- c. Menyimpulkan (verifikasi) dari hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diringkas kemudian diambil kesimpulan.

8. Teknik Keabsahan Data

Data yang telah benar - benar sah (valid), maka dilakukan pemeriksaan dengan dua teknik, sebagai berikut: Pertama, teknik triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan penelitian atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu, bias berupa penggunaan narasumber, metode, peneliti dan teori. Kedua, perbincangan dengan peneliti lain atau para ahli dibidangnya tentang topik atau hasil penelitian yang penulis peroleh, sehingga mendapatkan masukan dalam melakukan analisa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi distribusi

beras sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu dapat dilihat dari tiga aspek menurut teori Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, aktivitas atau penerapan, selanjutnya akan peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Organisasi

Berbicara tentang aspek organisasi sama halnya kita berbicara tentang aspek kelembagaan, organisasi di dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dalam pemberian program Rastra sudah berdasarkan surat perintah alokasi, dalam suatu program tentunya ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yang ada diprogram tersebut. Pelaksanaan program Beras Sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak, diawali dengan kegiatan keorganisasian dengan melakukan penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pihak-pihak terkait pemerintahan Kelurahan

Siantan Hulu, RW/RT dan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan pembagaian Rastra pihak Kelurahan mengalami kesusahan karena kurangnya tim koordinasi yang membantu sedangkan warga yang menerima berjumlah ratusan orang. Program Beras Sejahtera merupakan suatu upaya pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal khususnya daerah Siantan Hulu dengan populasi warga yang masih banyaknya menengah kebawah, dengan adanya program ini masyarakat sangat terbantu. Akan tetapi kenyataanya dalam pelaksanaan pembagian Beras Sejahtera ini belum sesuai tujuan, masih banyak masyarakat menengah kebawah di tahun 2018 tidak mendapat beras sejahtera ini.

Berdasarkan keterangan dari Kabid pelayanan publik perum Bulog Devisi regional Kalimantan Barat, mengatakan bahwa pelaksanaan distribusi Program Beras Sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu yang bertanggungjawab adalah Lurah Siantan Hulu atas pelaksanaan Program Beras Sejahtera di Kelurahan

Siantan Hulu.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Ketetapan sasaran dan sistem pelaksanaan program yang belum mengarah sepenuhnya sesuai rencana distribusi Program Beras Sejahtera di wilayah kerjanya menjadi faktor hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi (penyaluran) Program Beras Sejahtera di daerah Kelurahan Siantan Hulu.

Agar Program itu dapat mencapai tujuan, maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan program yang meliputi, desentralisasi yang artinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pengelola Program Beras Sejahtera kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Pontianak (sesuai UU nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004) partisipatif, artinya mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dan aktif, prioritas, artinya pengambilan keputusan mengutamakan kebutuhan

masyarakat miskin, terbuka artinya, informasi pengelolaan kegiatan dapat diakses dengan diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima beras sejahtera, diperoleh informasi bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi mengenai Program Beras Sejahtera karena pihak RT/RW serta pelaksana distribusi pemberdayaan masyarakat kurang memberikan sosialisasi dalam jangkauan yang luas kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Siantan Hulu. Sedangkan ada sebagian masyarakat menyatakan sudah mengetahui informasi sebelumnya mengenai Program Beras Sejahtera. Namun informasi yang diterima belum secara menyeluruh artinya pada umumnya masyarakat hanya tau adanya bantuan Beras Sejahtera, akan tetapi mengenai ketetapan penerima serta peraturan dalam cara penerimaan bantuan serta prosedur Program Beras Sejahtera belum diketahui oleh masyarakat umum di Kelurahan Siantan Hulu ini.

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan bahwa kemampuan Tim

Koordinasi Program Beras Sejahtera Kelurahan Siantan Hulu dalam mensosialisasikan Program Beras Sejahtera kepada masyarakat penerima manfaat dalam program hal yang dimaksud ialah RT/RW harus menginformasikan materi Program Beras Sejahtera mengenai mekanisme program, koordinasi para pelaku dalam mensosialisasikan Program Beras Sejahtera.

Kegiatan sosialisasi Program Beras Sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu, di samping ada yang dapat dipahami oleh masyarakat juga ada yang tidak dapat dipahami, tujuannya adalah untuk menghindari salah penggunaan dalam pendistribusian beras pada keluarga miskin dan mengutamakan prioritas utama kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu, maka Program Beras Sejahtera menetapkan kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Program Beras Sejahtera.

3. Aplikasi

Aplikasi atau penerapan merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya,

ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Indikator kinerja Program Beras Sejahtera dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (RTS-PM) ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target, yaitu : 1) Tepat sasaran, penerima manfaat Rastra hanya diberikan kepada RTS-PM berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1. 2) Tepat jumlah, jumlah bantuan Beras Sejahtera yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 10kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun. 3) Tepat Waktu, waktu pelaksanaan distribusi Beras Sejahtera kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi. 4) Tepat Administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. 5) Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas medium yang telah ditentukan yaitu, beras putih tidak berdebu, berhama dan tidak mengandung bahan pengawet.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada masyarakat penerima program Beras Sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu ini, menyatakan bahwa pelayanan

distribusi beras yang dilakukan oleh pelaksana distribusi masih belum tepat sasaran atau kurang belum memuaskan. Artinya akses pelayanan yang dilakukan pada kenyataannya di lapangan belum tepat pada masyarakat yang sangat memerlukan bantuan Beras Sejahtera ini, sedangkan masyarakat yang menerima terdapat beberapa yang dikatakan memiliki kecukupan kebutuhan sehari-hari, hal tersebut saya definisikan karena Kelurahan Siantan hulu masih menggunakan data penerima bantuan Beras Sejahtera yang lama, dan system pelaksanaan program tersebut yang belum mengarah sepenuhnya dengan rencana distribusi Program Beras Sejahtera untuk masyarakat menengah kebawah, sehingga kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan masih belum terdata dengan baik dan tepat sasaran, dan jumlah beras yang berikan masih tidak sesuai pedoman yang seharusnya 10kg serta masih adanya keluhan mengenai kualitas beras dari masyarakat penerima beras sejahtera tersebut dimana kualitas beras tidak layak dikonsumsi.

Berdasarkan informasi wawancara yang saya peroleh dari pihak-pihak

pegawai perum BULOG devisi Regional Kalimantan Barat GBB Wajo Hulu, hasil wawancara terhadap beberapa pegawai yang mengemas beras kedalam karung saya mendapati bahwa terjadinya masalah kualitas dalam pendistribusian bantuan Beras Sejahtera ini karena kurangnya pengawasan di tingkat kebersihan dari staff pekerja pengemas beras, sedangkan diketahui bahwa Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat bantuan Rastra ini yang tidak sesuai dengan kualitas BULOG yaitu beras kualitas medium, maka tim koordinasi Program Beras Sejahtera kelurahan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikan beras tersebut kepada satuan kerja pelaksana (satker) dalam hal ini yang dinaungi kelurahan Siantan Hulu dan harus menggantinya dengan kualitas beras yang sesuai dengan ketentuan. Peran perum BULOG sebagai salah satu operator dalam logistik pangan, khususnya beras, tugas BULOG berkisar pada penyediaan

pangan dengan kualitas yang baik/kualitas medium yaitu tidak berbau, berdebu, berkutu untuk disajikan kepada penerima manfaat bantuan beras tingkat medium yaitu penerima bantuan Beras Sejahtera dan Bantuan Sosial bencana.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Maka pada bagian akhir penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. **Organisasi**, pada pelaksanaan program Beras Sejahtera Di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan Rastra kepada masyarakat sudah sesuai surat perintah alokasi yaitu sudah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian bantuan Rastra tersebut. Hanya saja Tim koordinasi Beras Sejahtera Kelurahan Siantan Hulu memiliki kendala dalam pendistribusian Rastra karna tenaga pekerja yang menaungi distribusi Program Beras Sejahtera yang masih minim, dan Kelurahan Siantan Hulu masih menggunakan data lama sehingga masih banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan Rastra tersebut.
2. **Interpretasi**, pada pelaksanaan program Beras Sejahtera Di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak mengalami permasalahan seperti, Sosialisasi yang dilakukan masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dari RT/RW yang diserahkan wewenang oleh Kantor Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak, sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai program Rastra.
3. **Aplikasi**, Implementasi Distribusi Beras Sejahtera Di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak ini adalah dalam penerapannya berdasarkan pedoman umum Beras Sejahtera yaitu: Tepat sasaran, pelaksanaan pendistribusian Rastra di Kelurahan Siantan Hulu mengalami masalah yaitu sasaran penerima manfaat Rastra yang kurang tepat. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan merupakan data yang didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) 2011, data tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga miskin karena ekonomi masyarakat setiap tahunnya berubah. Tepat jumlah,

jumlah beras yang diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat Rastra di Kelurahan Siantan Hulu tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan yaitu 10kg/RTS/Bulan, karena masih ada masyarakat yang menerima dengan jumlah dibawah dari yang telah ditetapkan. Tepat waktu, pelaksanaan distribusi Rastra di Kelurahan Siantan Hulu disalurkan selama berkala selama sebulan dan langsung didistribusikan kepada penerima manfaat Rastra melalui pembagian di tempat yang telah ditentukan Tim satuan kerja Rastra. Tepat administrasi, pendistribusian beras Rastra di Kelurahan Siantan Hulu sudah tepat administrasi yang meliputi pembagian kepada masyarakat yang terdata oleh Kelurahan Siantan Hulu. Tepat Kualitas, kualitas beras yang disajikan Perum Bulog kepada penerima bantuan Program Rastra masih belum sesuai dengan standart beras medium yang ditetapkan oleh Perum Bulog tersebut. Karena beras yang diterima masyarakat kualitasnya tidak layak konsumsi.

2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan dikemukakan sebagai upaya perbaikan atas

penyampaian atau penyempurnaan atas kelemahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi belum rutin, untuk itu perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang diharap memang membutuhkan bantuan dari Program Beras Sejahtera.
2. Para pelaksana kebijakan dinilai belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya perbaikan dalam internal itu sendiri.
3. Perlu adanya perhatian khusus dalam penyajian Beras Sejahtera ini agar dalam pendistribusian masyarakat dapat menerima bantuan yang berbentuk kualitas yang baik dari pemerintah yang menjalankan Program Beras Sejahtera ini, sehingga terciptanya kecukupan pangan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah harus lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dimana masih banyak masyarakat menengah kebawah tidak menerima bantuan, data penerima manfaat harus diperbaiki dan dalam

memberikan Rastra harus adil dan rata dalam segi jumlah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sugiono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.